

BAB IV

KONSIDERAN-KONSIDERAN YANG MEMPENGARUHI ARAB SAUDI MEMUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIKNYA TERHADAP KANADA TAHUN 2018

Seusai penjabaran tentang bagaimana dinamika politik dalam negeri dan kemana haluan politik luar negeri Arab Saudi pada bab II, serta bagaimana dinamika hubungan Arab Saudi dan Kanada pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan berusaha menjelaskan tentang apasaja alasan kuat yang mendasari mengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap Kanada.

Jika menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin, maka terdapat tiga konsideran yang mempengaruhi pembuatan suatu keputusan luar negeri yaitu; politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional. Maka dalam bab ini penulis akan menjabarkan ketiga konsideran yang dianggap merupakan alasan kuat yang mendasari pemutusan hubungan Arab Saudi terhadap Kanada. Aktor dibalik pengambil kebijakan tersebut yang termasuk dalam konsideran pertama dan kepentingan nasional yang berusaha dilindungi dan dicapai Arab Saudi yang termasuk dalam penjelasan tentang konsideran kedua dan ketiga yaitu kekuatan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Dengan mengamati tiga konsideran tersebut, yakni politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer dan konteks internasional yang merupakan objek dalam pertimbangan dalam memutuskan kebijakannya terhadap Kanada dan juga nantinya akan dapat menjelaskan alasan mengapa Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kanada.

A. Sistem Pengambilan Keputusan Arab Saudi yang Monolit

Coplin memfokuskan analisisnya pada hubungan antar para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor dalam negeri, yang berupaya mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Coplin memberikan istilah *policy influencers* bagi yang

mempengaruhi kebijakan atau pengambil keputusan. Pengambil keputusan dapat menentukan kepentingan nasionalnya, mengatur strategi dan membuat kebijakan atau mengevaluasi kebijakan yang sudah dijalankan. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini Arab Saudi akan memfokuskan diri dalam membahas *policy influencer* yang dikategorikan Coplin menjadi empat kategori yaitu, *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer*. Kategori yang tepat dalam menganalisa kasus pemutusan hubungan diplomatiknya terhadap Kanada ialah tipe *bureaucratic influencer*.

Arab Saudi merupakan negara mengadopsi sistem monarki absolut, yang mana Raja adalah aktor tunggal dalam pengambilan keputusan baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari bentuk Kekuasaan politik yang sangat terpusat pada Raja yang memegang berbagai macam jabatan, yaitu sebagai; Kepala Dinasti Saud, Perdana Menteri, Kepala Eksekutif, Imam Keagamaan Tertinggi, Komandan Angkatan Bersenjata serta Kepala Pengadilan (Jatmika, 2001, hal. 72). Seperti yang tertera pula pada pasal 5/A Undang-Undang Dasar Pemerintahan : “*The System of government in the Kingdom of Saudi Arabia is that of a monarchy.*” (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2011).

Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Dasar Arab Saudi, maka akan lebih jelas terlihat bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan sistem monarki absolut, ini dibuktikan dengan adanya hukum dasar yang memang memberikan otoritas yang luas dan tinggi kepada Raja sebagai kepala pemerintah sekaligus pemegang kekuasaan tunggal di Arab Saudi. Akan tetapi jika dilihat kembali tentang otoritas utama Raja, maka sesungguhnya terdapat beberapa keterbatasan dari otoritas yang dimiliki oleh Raja dikarenakan pengaruh keluarga kerajaan yang sangat kuat. Keterbatasan lain ialah otoritas yang dimiliki oleh Raja dan pengaruh besar keluarga kerajaan dalam proses pengambilan keputusan di Arab Saudi membuat suatu definisi baru tentang sistem monarki yang tidak sepenuhnya absolut (Alsultan, 2013).

Dalam bukunya Herb yang berjudul *All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchies* (1999) menjelaskan:

Of the ruling families monopolize the highest state offices, including the premiership and the portfolios of interior, Foreign Affairs and Defense, the ministries known in Gulfs as the wizarat al-siyada, or ministries of sovereignty. The ruling families also distribute members throughout lower positions in the state apparatus, especially in the key ministrie (Herb, 1999).

Dari pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa kekuasaan Raja Arab Saudi tidaklah mutlak. Keluarga kerajaan juga memiliki pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan politik Arab Saudi. Mengingat bahwa keluarga kerajaan menduduki posisi penting dalam pemerintahan Arab Saudi (Alsultan, 2013).

Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud yang saat ini menjabat sebagai Raja di Arab Saudi sudah menduduki tahta kerajaan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Putra Mahkota Arab Saudi saat ini adalah Pangeran Muhammad bin Salman. Penasihat Raja Salman (setingkat menteri) adalah Pangeran Turki bin Muhammad bin Saud al-Kabir as-Saud. Penasihat Istana, yaitu: Pangeran Khalid bin Saud bin Khalis as-Saud, Pangeran Bandar bin Saud bin Muhammad as-Saud, Pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan bin Abdul Aziz as-Saud, Pangeran Muhammad bin Abdurrahman bin Abdulaziz as-Saud, Ali bin Ibrahim an-Naimi, Saad bin Nasir asy-Syathri, Rafat bin Abdullah as-Sabbagh (Assegaf, 2016). Dari susunan struktural tersebut dapat dilihat bahwa keluarga kerajaan memang memiliki hak keistimewaan dalam pemerintahan Arab Saudi. Hal inilah yang membuat keluarga kerajaan pada akhirnya memiliki pengaruh yang besar terhadap Raja dalam pengambilan kebijakannya.

Keluarga kerajaan Arab Saudi juga merupakan pemeran utama yang akan memilih kandidat yang memenuhi syarat sebagai Raja. Keluarga kerajaan juga memiliki kekuatan untuk mengganti Raja, jika Raja tersebut membahayakan martabat atau masa depan dinasti atau jika ia bertindak berlebihan dan membahayakan negara atau kerajaan (Alsultan, 2013). Keputusan penting dalam sistem monarki dinasti selalu dibangun dan dirumuskan di atas konsensus di antara para anggota senior keluarga kerajaan yang mana sebelum membuat suatu kebijakan atau keputusan, Raja harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anggota senior keluarga kerajaan dan dia harus mendengarkan dan mempertimbangkan seluruh masukan yang ada (Stenslie, 2011).

Otoritas keluarga kerajaan diperoleh dari dekrit kerajaan yang dikeluarkan Raja Abdullah bin Abdulaziz pada tahun 2006. Raja Abdulaziz mengumumkan pembentukan *The Allegiance Institution*. Badan ini merupakan badan yang terdiri dari tiga puluh anggota keluarga kerajaan, masing-masing mewakili cabang putra Raja Abdulaziz bin Abdurrahman. Dalam pasal 11 dan 12 dalam *The Allegiance Institution* menetapkan bahwa anggota Lembaga memiliki otoritas penuh untuk mencalonkan dan memilih Pangeran Mahkota serta Raja Arab Saudi berikutnya. Selain itu, pada pasal 15 *the Allegiance Institution* memiliki kekuatan untuk menggantikan Raja dan atau Pangeran Mahkota jika menemukan bahwa mereka secara permanen tidak mampu memimpin kerajaan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan (Henderson, 2009).

Dengan sistem monarki yang bercorak seperti ini maka jelas bahwa pengambilan keputusan luar negeri Arab Saudi dipengaruhi oleh lingkaran dalam keluarga kerajaan. Seperti yang dikatakan oleh Nizar Bin Obaid Madani, *Saudi Minister of State for Foreign Affairs* :

“The King always consults with the Crown Prince, the deputy Crown Prince and other senior members of the royal family when performing internal and

external policies. The King also consults various bodies before making decision. The Ministry of the foreign affairs, Defence Ministry, Ministry of internal affairs, the National Security Council the Saudi Intelligence and Majlis Ash Shura (the Saudi Parliament) all play an important role in providing the King and his deputies with the necessary studies, advice and suggestions. In addition, the King has a privet consultants, wither they are religious scholars, economists, politicians, militaries and other experts. Saudi Arabia has a unique system which allow the government to study and analyzes all suggestions, views and advise, and when the government make its decision, the whole country work together as one unite to achieve its goals.”(Alsultan, 2013).

Dari pernyataan Nizar diatas maka dapat dilihat bahwa dalam membuat keputusan luar negeri Arab Saudi, Raja bukan merupakan aktor tunggal dalam proses pengambilan dan perumusan keputusan. Dimana ada peran dominan dari keluarga kerajaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan adanya sistem monarki yang bersifat dinasti inilah yang membuat kebijakan luar negeri Arab Saudi diharapkan tidak membahayakan nama baik Keluarga Kerajaan Al-Saud.

Setelah pemaparan tentang bagaimana corak sistem monarki Arab Saudi yang sesungguhnya diterapkan dalam Kerajaan Arab Saudi maka dapat dianalisis lebih jauh bahwa sistem tersebut juga berlaku dalam proses pembuatan keputusan Arab Saudi untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Kanada yang mana Raja berperan sebagai aktor tunggal dalam pengambil kebijakan ternyata mendapat pengaruh dan dukungan besar dari anggota keluarga kerajaan yang mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan.

Peran birokrasi dalam pengambilan keputusan oleh Raja juga dapat dilihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, seperti yang diungkapkan melalui akun Twitter Resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi:

“The negative and surprising attitude of Canada is an entirely false claim and utterly incorrect. We have been briefed by what the Canadian foreign minister and the Canadian embassy to the Kingdom released on what they named “civil society rights activists”, and we affirm that this negative and surprising attitude is an incorrect claim. The Canadian position is an overt and blatant interference in the internal affairs of the Kingdom of Saudi Arabia and is in contravention of the most basic international norms and all the charters governing relations between States. The Canadian position is a grave and unacceptable violation of the Kingdom’s laws and procedures. In addition to violate the Kingdom’s judiciary and a breach of the principle of sovereignty. Kingdom of Saudi Arabia through its history has not and will not accept any form of interfering in the internal affairs of the Kingdom. The KSA considers the Canadian position an attack on the Ksa and requires a firm stance to deter who attempts to undermine the sovereignty of the KSA. Using the phrase (immediately release) in the Canadian statement is very unfortunate, reprehensible and unacceptable in relations between States. Any other attempt to interfere with our internal affairs from Canada, means that we are allowed to interfere in Canada’s internal affairs. The KSA announces the summoning of the ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Canada. We consider the Canadian ambassador to

the Kingdom of Saudi Arabia persona non grata and order him to leave within the next 24 hours. The KSA announce the freezing of all new trade and investment transactions between the KSA and Canada. The KSA reserves its right to take further action” (BBC, 2018).

Dari pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Arab Saudi sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Kanada yang dianggap sangat melanggar prinsip kedaulatan. Hal ini sangat jelas menjadi pertimbangan mengapa Raja mengeluarkan keputusan untuk memusuhi Kanada.

Jika ditarik benang merah tentang faktor kemarahan Arab Saudi terhadap Kanada, maka terdapat dua faktor penyebab mengapa Arab Saudi bertindak untuk memusuhi Kanada. Faktor pertama, Kanada dianggap telah melakukan intervensi terhadap masalah dalam Negeri Arab Saudi. Kerajaan sangat amat menegaskan bahwa Arab Saudi memiliki penafsiran tersendiri dalam memaknai HAM (Hak Asasi Manusia). Pihak Kerajaan memiliki hak prerogratif untuk menangkap, bahkan memenjarakan siapa saja yang menentang kebijakan kerajaan, bahkan jika sikap tersebut dianggap bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Faktor kedua, Kanada dianggap tidak menghormati penegakkan hukum dan proses peradilan yang sedang berlangsung di Arab Saudi. Penangkapan terhadap ulama dan para aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakkan hukum (Misrawi, Detik News, 2018).

Berdasarkan dua faktor penyebab mengapa Arab Saudi menceraikan Kanada, dapat dilihat bahwa peran Keluarga Kerajaan yang merupakan bagian dari Birokrasi Arab Saudi itu sendiri yang sangat amat dominan. Birokrasi yang dimaksud disini ialah para keluarga Kerajaan yang memegang posisi persis dibawah Raja seperti Dewan Menteri, Departemen dan *Key Person* dan Majelis

Al-Shura (Majelis Permusyawaratan). Dapat dilihat bahwa peran Putra Mahkota yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sangatlah berpengaruh terhadap keputusan Raja. Terlebih pewaris tahta terkuat di wilayah tersebut yaitu Pangeran Mohammed bin Salman tetap berpegang teguh kepada prinsip menangkis perbedaan pendapat dan tidak mentolerir jika pendapat atau kritik yang dilayangkan pihak luar dianggap dapat mengkhawatirkan dan mengancam kedaulatan Arab Saudi.

Dalam kasus ini jelas bahwa keputusan Raja Arab Saudi sebagai aktor tunggal pengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kanada pada 6 Agustus 2018 lalu bukan merupakan kemauan pribadi Raja Salman, namun keputusan ini tidak terlepas dari pertimbangan matang yang telah dimusyawarahkan dengan keluarga kerajaan dan memperoleh dukungan sehingga Raja dapat mengambil keputusan tersebut.

B. Kondisi Ekonomi dan Pertahanan Militer Arab Saudi yang Mandiri

Setelah melihat proses pengambilan keputusan luar negeri Arab Saudi terhadap Kanada, kondisi ekonomi dalam negeri Arab Saudi sangatlah berpengaruh dalam setiap prosesnya. Menurut Coplin jika ingin mengetahui kondisi ekonomi suatu negara, kita tentu harus menakar terlebih dahulu kemakmuran negara, kemampuan kemakmuran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, pola-pola pertumbuhan ekonominya seperti apa, mengetahui jumlah absolut barang dan jasa yang telah diproduksi, jumlah relatif dan prospek pertumbuhan ekonomi (Coplin W. D., 2003). Untuk menakar hal-hal tersebut kita dapat melihatnya menggunakan konsep GDP (*Gross Domestic Product*), GNP (*Gross National Product*) ataupun GNI (*Gross National Income*) yang telah dikembangkan dalam ilmu ekonomi. Arab Saudi akan dilihat melalui sudut pandang GNI nya, dikarenakan World Bank telah mengubah penakaran kondisi ekonomi negara dari GNP ke GNI.

Berdasarkan data dari World Bank, besar GNI Arab Saudi dari tahun 2011-2015 memiliki jumlah pendapatan yang besar. Pada 2015 GNI Arab Saudi mencapai 742.707 juta dollar Amerika. Besar GNI tersebut juga menempatkan Arab Saudi di 20 besar negara dengan GNI terbesar di dunia. Arab Saudi menempati peringkat ke-19 dibawah Turki. Dapat dilihat pula bahwa dari tahun 2011-2015 GNI per kapita Arab Saudi terus meningkat dengan GNI per kapita tertinggi sebesar 54.730 juta dollar Amerika pada tahun 2015. Sehingga menjadikan Arab Saudi sebagai *High Income Economy Country*. Sebuah negara diklasifikasikan sebagai *High Income Economy Country* apabila GNI per kapitanya lebih dari 12.475 dollar Amerika per tahun. GNI per kapita Arab Saudi dari tahun 2011-2015 terbukti bahwa negara tersebut tidak pernah berada di bawah level *High Income Economy Country*, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi perekonomian Arab Saudi terbilang cukup kuat.

Pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada tentu sudah sangat mempertimbangkan kondisi ekonomi Arab Saudi. Selain kondisi perekonomian negara yang kuat, hubungan kerjasama perdagangan Arab Saudi dan Kanada tergolong mengalami pasang surut. Arab Saudi telah menjadi pasar ekspor terbesar kedua di Teluk bagi Kanada setelah Uni Emirat Arab. Ekspor Kanada ke Saudi bisa mencapai 1,12 miliar dollar Amerika pada tahun 2017 atau 0,2 persen dari jumlah nilai ekspor negara tersebut. Hubungan dagang kedua negara bisa mencapai hampir 4 miliar dollar Amerika per tahun. Kanada juga mengimpor 75 ribu hingga 80 ribu barel minyak dari Saudi setiap harinya. Adapun perjanjian dagang yang sudah disetujui Saudi pada 2014 untuk membeli kendaraan tempur dari perusahaan Kanada senilai 13 miliar dollar Amerika atau lebih dari 187 triliun (Kumparan, 2018). Hubungan dagang kedua negara lebih kepada menguntungkan pihak Kanada jika terus berlanjut, sebab walaupun tidak berlanjut Arab Saudi sama sekali tidak akan mengalami kerugian. Jadi pemutusan

hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada sama sekali tidak akan memperburuk perekonomian Arab Saudi.

Kemudian kondisi militer Arab Saudi juga sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan luar negeri Arab Saudi terhadap Kanada. Menurut Coplin ada pula tiga kriteria yang paling penting dalam menentukan kekuatan militer suatu negara yaitu, jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan perlengkapan militernya. Sehingga untuk mengetahui kondisi militer Arab Saudi kita dapat meninjau dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan serta perlengkapan militer yang dimiliki olehnya.

Melihat dari data *Global Fire Power* pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki 15.300.000 personil yang tersedia. Jumlah peronil aktif yang bertugas bisa mencapai 235.000 personil. Pada tahun 2015 angkatan bersenjata Arab Saudi memiliki personil sebagai berikut: tentara berjumlah 75.000 personil; angkatan udara berjumlah 20.000 personil; pertahanan udara berjumlah 16.000 personil; dan angkatan laut berjumlah 15.500 (termasuk 3.000 marinir). Pasukan rudal strategis berjumlah 2500 personil. Tidak hanya itu, *Saudi Arabian National Guard* juga memiliki 100.000 tentara aktif dan 25.000 pasukan paramiliter (Global Security, 2019).

Akademi militer kepunyaan Raja Abdul al-Aziz merupakan sumber utama dari letnan kedua untuk tentara di Arab Saudi. Membutuhkan waktu tiga tahun untuk memperoleh gelar sarjana ilmu militer dan komisi. Setelah lulus letnan kedua baru bisa masuk sekolah cabang untuk melanjutkan spesialisasi di infanteri. Artileri, armor, persenjataan, unit udara, insinyur, komunikasi, polisi militer atau administrasi. Petugas di pertengahan karir juga bersaing untuk mendapatkan tempat di sekolah Staf dan Komando di Riyadh agar bisa memperoleh gelar master ilmu militer yaitu langkah yang dibutuhkan untuk menuju promosi ke jajaran senior. Petugas yang terpilih kemudain dapat melanjutkan keperguruan tinggi militer yang lebih tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dari

penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Arab Saudi mementingkan kualitas dari tentara yang dihasilkan dari pelatihan panjang tersebut. Tentara Arab Saudi bukanlah tentara yang sembarangan, namun mereka tertib mengikuti pelatihan yang lama untuk bisa menjadi tentara bagi Negara (Global Security, 2019).

Kemudian pelatihan penerbangan Angkatan Udara berlangsung di *King Faisal Air Academy* di Al-Kharj. Pelatihan penerbangan itu sendiri terdiri dari kursus dua puluh tujuh bulan. *British Aerospace* merupakan instruktur yang difasilitasi oleh Arab Saudi khusus untuk melatih angkatan udaranya. Setelah mereka berhasil menyelesaikan pelatihan utamanya, pasukan Angkatan Udara ditugaskan selama beberapa bulan pelatihan lanjutan dari *British Strikemasters* dan *Hawks*, yang memiliki peralatan cukup canggih. Semua fasilitas Angkatan Laut dan teknis pelatihan dibangun dibawah bimbingan Amerika Serikat. Untuk memperoleh kualitas yang baik dalam pelatihan tentaranya, Arab Saudi juga menjalin kerja sama dengan Amerika dan Inggris yang merupakan negara maju dalam bidang militer (Global Security, 2019).

Seusai mengetahui jumlah pasukan serta pelatihan yang dimiliki dan dilakukan oleh Arab Saudi, selanjutnya penting untuk mengetahui kelengkapan militer yang dimiliki oleh Arab Saudi. Berdasarkan data dari *Global Fire Power* pada tahun 2015 jumlah perlengkapan militer Arab Saudi Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Jumlah Perlengkapan Militer Arab Saudi tahun 2015

Name	Units	Scale	2015
Available Manpower	Persons	Units	15,300,000
Fit for Service	Persons	Units	14,000,000

Active Frontline Personnel	Persons	Units	235,000
Active Reserve Personnel	Persons	Units	25,000
Tanks (MBT/Light)	Number	Units	1,210
Armored Fighting Vehicles (AFVs)	Number	Units	5,472
Self-Propelled Guns (SPGs)	Number	Units	524
Towed Artillery Pieces	Number	Units	432
Multiple-Launch Rocket Systems (MLRSs)	Number	Units	322
Total Aircraft	Number	Units	772
Fighters/Interceptors	Number	Units	245
Fixed-Wing Attack Aircraft	Number	Units	245
Transport Aircraft	Number	Units	221
Trainer Aircraft	Number	Units	213
Helicopters	Number	Units	204
Attack Helicopters	Number	Units	22
Total Naval Strength	Number	Units	55
Frigates	Number	Units	7
Corvettes	Number	Units	4
Coastal Defense Craft	Number	Units	39
Mine Warfare	Number	Units	3

Sumber : Global Security

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Arab Saudi memiliki 772 unit pesawat tempur, jumlah tersebut menunjukkan kekuatan militer di wilayah udara yang cukup kuat di ranah regional. Maka tidak

dianggap berlebihan apabila Arab Saudi menyandang status sebagai negara dengan kekuatan militer yang cukup mumpuni. Ini dibuktikan pula dengan artikel dari *Bussines Insider* yang mendeklarasikan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar ke-3 di Timur Tengah dan berada di urutan ke-27 sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Penempatan peringkat tersebut dipertimbangkan melalui aspek pendanaan yang disediakan untuk militer dan pertahanan, keterbaruan senjata dan aspek lainnya. Arab Saudi menyisihkan 87,2 juta dollar Amerika untuk anggaran militernya, yang kemudian menjadikannya sebagai negara di urutan ke-3 di dunia dalam hal pendanaan militer yang telah disediakan sedangkan Kanada berada di peringkat ke-14. Penyediaan anggaran militer menjadi penentu seberapa siap negara-negara dalam menghadapi perang yang akan terjadi. Adanya anggaran militer ini diperlukan untuk memelihara alat-alat militer sekaligus penguatan militer itu sendiri (Money Smart, 2018). Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi, keputusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada tentu saja juga ikut menyertakan pertimbangan dari sisi kondisi militer negaranya.

Dari pemaparan kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi, bahwa dalam pengambilan keputusan luar negeri berupa keputusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada mempertimbangkan kondisi ekonomi dan militer negaranya. Minimnya interaksi perdagangan antara Arab Saudi dan Kanada, serta kuatnya militer dan besarnya anggaran militer Arab Saudi dibandingkan dengan Kanada membuat Kerajaan tidak memiliki keraguan sedikitpun dalam mengambil kebijakan berupa keputusan hubungan diplomatik terhadap Kanada.

C. Kanada Dianggap Melakukan Intervensi Politik

Dalam era modern seperti sekarang ini seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, hubungan antar-negara pun semakin mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Menurut Coplin ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar Negeri suatu Negara,

yaitu geografis, ekonomis dan politis. Dalam hal ini, lingkungan internasional setiap Negara berdiri atas lokasi yang didudukinya, dalam kaitannya dengan Negara-negara lain dalam sistem itu dan juga hubungan-hubungan ekonomi dan politik antara Negara itu dengan Negara lain. Oleh sebab itu pembahasan mengenai pengambilan kebijakan pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada tidak terlepas dari pengaruh konteks internasionalnya. Sehingga dukungan dan pernyataan sikap dari negara-negara yang masih menjalin hubungan baik dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

Panas dingin hubungan Arab Saudi – Kanada ternyata bermula dari kesepakatan yang dilakukan kedua negara dalam urusan ekspor senjata terbesar pada tahun 2014. Kesepakatan penjualan kendaraan baja lapis ringan (LAV), sistem senjata, suku cadang dan data teknis terkait ke Arab Saudi yang bernilai 15 miliar dolar AS ini sangat menguntungkan bagi Kanada. Namun dibalik kesepakatan tersebut ada paduan suara yang melontarkan kritik pedas yang dipimpin oleh *Globe and Mail* yang berasal dari aktivis dan organisasi masyarakat sipil (GAC Saudi Arabia, 2016). Penjualan kendaraan baja lapis ringan ini akan memerlukan 3.000 pekerja tambahan untuk merakit dan merawat kendaraan tersebut selama 14 tahun. Kesepakatan ini juga akan meningkatkan keahlian dan penelitian serta pengembangan di industri pertahanan Kanada. Kerjasama yang terjalin antara Arab Saudi tak hanya menguntungkan perekonomian Kanada tetapi juga sangat menguntungkan bagi persenjataan Arab Saudi (Saudi Arabia Cultural Bureau in Canada, 2007). Namun para kritikus sebagian berpendapat bahwa catatan hak asasi manusia di Arab Saudi sangat buruk sehingga menuntut Kanada untuk membatalkan penjualan tersebut. Pihak *Globe and Mail* menganggap dirinya telah mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Arab Saudi dan pasukannya menggunakan LAV untuk memadamkan protes di wilayah Timur Arab Saudi yang didominasi oleh Syiah. Pasukan Arab Saudi juga dituding menggunakan LAV buatan Kanada ketika mereka membantu pemerintah Bahrain

memadamkan protes jalanan pada tahun 2011. Kritik tersebut menuntut Ottawa untuk menanggukkan penjualan LAV ke Arab Saudi dan menekan Arab Saudi untuk melakukan reformasi di dalam negeri(GAC Saudi Arabia, 2016).

Hubungan kedua negara semakin memanas ketika Kanada mendengar kabar penangkapan dua aktivis perempuan yang berfokus menyuarkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland di Akun Twitternya mengkritik pedas penangkapan Samar Badawi, seorang aktivis HAM perempuan yang keluar-masuk penjara Arab Saudi. Melalui cuitan via Twitter, Menteri Luar Negeri Kanada Freeland juga menghimbau pemerintah di Riyadh untuk segera membebaskan Raif dan Samar Badawi. Arab Saudi telah mantap memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Kanada setelah melihat kritik yang dilayangkan oleh Pemerintahan Kanada terhadap Arab Saudi melalui Akun Twitternya yakni atas tuduhan bahwa Kanada telah melakukan dua kesalahan yang dianggap sangat fatal. Pertama, Kanada dianggap telah melakukan intervensi terhadap masalah dalam Negeri Arab Saudi. Kerajaan sangat amat menegaskan bahwa Arab Saudi memiliki penafsiran tersendiri dalam memaknai HAM (Hak Asasi Manusia). Pihak Kerajaan memiliki hak prerogatif untuk menangkap, bahkan memenjarakan siapa saja yang menentang kebijakan kerajaan, bahkan jika sikap tersebut dianggap bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Kedua, Kanada dianggap tidak menghormati penegakkan hukum dan proses peradilan yang sedang berlangsung di Arab Saudi. Penangkapan terhadap ulama dan para aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penegakkan hukum. Oleh karena itu, Kanada tidak pantas melakukan intervensi terhadap kedaulatan hukum yang berlangsung di Arab Saudi(Misrawi, Perseteruan Arab Saudi dan Kanada, 2018). Tindakan Kanada juga sangat melukai harga diri Arab Saudi yang sudah dijaganya sejak lama, sedangkan yang kita tahu Arab Saudi merupakan negara yang selalu ingin mempertahankan kekuasaannya di kawasan Timur Tengah.

Kerajaan Arab Saudi meskipun mengadopsi sistem monarki absolut, ia tidak menutup diri dari panggung internasional. Dibuktikan dengan adanya keterlibatan aktif Arab Saudi dalam sejumlah organisasi internasional seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), OKI (Organisasi Konferensi Islam), Liga Arab, IIRO (*International Islamic Relief Organization*), GCC (*Gulf Cooperation Council*) dan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*)(Yasinta, 2019). Tidak hanya di panggung Organisasi Internasional, Arab Saudi juga terlibat sejumlah kerjasama dengan beberapa Negara diluar kawasan.

Arab Saudi merupakan salah satu dari tujuh negara yang terletak dikawasan Teluk Persia. Adapun negara – negara Arab yang secara geografis terletak di kawasan Teluk Persia yaitu Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, yang mana negara – negara tersebut selain Irak tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk atau *Gulf Cooperation Council* (GCC). Institusi ini memiliki tujuan bersama untuk saling bekerjasama diberbagai bidang seperti agama, keuangan, keamanan, pertahanan, perdagangan, bea cukai, pariwisata, legislasi, dan administrasi.

Negara – negara GCC memiliki keyakinan bahwa tantangan keamanan di kawasan regional, seperti kawasan teluk yang cenderung tidak stabil membuat mereka merasa perlu menerapkan kebijakan mengenai koordinasi mobilitas keamanan. Negara – negara GCC juga memandang fakta geopolitik dan persamaan ideologi membuat mereka memiliki prinsip bahwa “agresi terhadap salah satu dari mereka dianggap agresi terhadap mereka semua.” Hal ini yang membuat kerjasama di bidang militer merupakan prioritas penting yang menjadi landasan mereka dalam mencapai tujuan bersama(Global Security, 2015).

Pemikiran tentang koordinasi keamanan atau pertahanan bersama antara negara – negara anggota GCC sesungguhnya telah ada sejak lama, yaitu sejak Arab Saudi meratifikasi sebuah perjanjian keamanan dengan Kuwait pada 1942; bahkan jauh sebelum GCC

sendiri ada. Gagasan untuk membentuk koordinasi keamanan kawasan tersebut muncul secara bertahap seiring dengan meningkatnya tantangan politik dan keamanan di Kawasan Teluk khususnya dan di kawasan Timur Tengah umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Ahmed Bin Abdul Aziz bahwa: *"the security cooperation between the Gulf States was in existence for a long time basically because of the religious, social, cultural and other bonds"* (Al-Saud, 1997).

Jika dilihat dari fakta geopolitik dan persamaan ideologi membuat mereka memiliki prinsip yang sangat kuat. Apabila satu negara mengalami tekanan maka tekanan tersebut juga akan dirasakan oleh negara lain. Seperti yang dilansir oleh *Arab News*, Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menyuarakan dukungan secara penuh untuk Arab Saudi terkait kebijakan Luar Negerinya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Kanada. GCC juga menyatakan dukungannya terhadap Kerajaan Arab Saudi untuk melawan Kanada yang dianggap sudah mencampuri urusan internal Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Bahrain juga turut menyatakan dukungannya terhadap langkah Arab Saudi yang dianggap tepat dalam menyikapi campur tangan eksternal atau pihak yang berupaya merusak kedaulatan Arab Saudi (Firmansyah, 2018). Seperti yang dikuti oleh Reuters: "Bahrain menegaskan, solidaritas penuh dengan Arab Saudi, terhadap siapa pun yang berusaha merusak kedaulatannya," ini sampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan (Maulana V. , 2018). Sesudah Bahrain ada pula Uni Emirat Arab yang menyerukan dukungannya. Menteri urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab yakni Anwar Gargash dalam akun Twitter pribadinya mengatakan "Kita berdiri di sisi Arab Saudi dalam membela kedaulatannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hukumnya". Ia juga mengatakan bahwa UAE akan mengambil tindakan yang sama apabila ada negara yang berusaha mengganggu kedaulatan negaranya dan tidak menerima segala sesuatu yang membuat hukum dan kedaulatannya tunduk pada tekanan (Firmansyah, 2018). Mesir pun

mengatakan bahwa mereka mendukung Saudi secara penuh dan tetap menjunjung tinggi solidaritas yang telah terbangun antar kedua negara untuk melawan campur tangan asing yang telah menyinggung urusan dalam negeri Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Kairo menuliskan pernyataan dukungannya melalui akun Facebook pribadinya berupa: *“concerned by the crisis between Saudi Arabia and Canada, which is a result of the negative tendency by some international ... sides of meddling in the internal affairs of countries in the region,”*(Davidson, 2018). Palestina pun ikut menyuarakan dukungannya terhadap Arab Saudi, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa campur tangan Kanada dalam urusan internal Kerajaan dianggap sudah melewati batas (VOA Islam, 2018).

Tidak hanya negara kawasan Teluk yang menyatakan dukungan penuh untuk Arab Saudi melainkan negara diluar kawasan juga menyatakan dukungannya untuk Arab Saudi seperti Rusia. Rusia menyuarakan dukungan untuk Arab Saudi dalam pertikaiannya dengan Kanada melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya yaitu Maria Zakharova, ia mengatakan bahwa hak asasi manusia harus dipromosikan sehubungan dengan adat dan tradisi nasional tertentu. Zakharova juga mengatakan: *“We have always said that the politicization of human rights matters is unacceptable, what one probably needs in this situation is constructive advice and assistance rather than criticism from a ‘moral superior’,”*. (Balmforth, 2018). Setelah Rusia, Mesir pun ikut menyuarakan dukungannya terhadap Arab Saudi.

Seperti yang telah dipaparkan, bahwa kebijakan Luar Negeri yang diambil oleh suatu negara dapat dipengaruhi oleh reaksi yang diberikan oleh negara-negara didalam kawasan maupun diluar kawasan yang masih menjalin hubungan baik baik secara geografi, ekonomi maupun politik. Kritik yang disampaikan oleh Kanada dianggap telah mengganggu kedaulatan Arab Saudi yang telah disetujui pula oleh banyak pihak sehingga telah mempengaruhi Arab Saudi untuk terus percaya diri akan keputusannya untuk mengambil

kebijakan luar negeri berupa pemutusan hubungan diplomatiknya terhadap Kanada.

Pada bab IV ini telah penulis jelaskan konsideran-konsideran yang mempengaruhi Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap Kanada. Konsideran pertama adalah politik dalam negeri Arab Saudi yang dimana keluarga kerajaan memiliki peran dan pengaruh yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan di ranah pemerintahan serta memberikan dukungannya dalam kasus pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada. Konsideran kedua merupakan pertimbangan dari kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi yang mana kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi yang kuat membuat pengambil kebijakan Arab Saudi tidak ragu dalam menentukan sikapnya terhadap Kanada. Konsideran yang terakhir adalah konteks internasional yang mana Arab Saudi mendapat dukungan penuh dari negara-negara Teluk, Organisasi regional serta negara diluar kawasan yang sepakat menagtakan bahwa tindakan yang dilakukan Kanada telah melampaui batas membuat Arab Saudi semakin percaya diri dan menganggap langkahnya adalh yang paling benar dalam memutuskan hubungannya dengan Kanada. Ketiga konsideran ini sangat mempengaruhi pengambil kebijakan Arab Saudi dalam memutuskan hubungan diplomatiknya terhadap Kanada.